



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu Periode pelaporan. Tujuan pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) sebagai suatu entitas pelaporan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber pendapatan, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- b) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 44987);
- d) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
- p) Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak;
- q) Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak.
- r) Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan SKPD

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1 Ikhtisar Pencapaian Target kinerja keuangan pemerintah daerah
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas akuntansi SKPD
- 3.2 Basis akuntansi
- 3.3 Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan kebijakan akuntansi

BAB IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 4.1 Rincian dari Penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 4.1.1 Pendapatan - LRA
 - 4.1.2 Belanja
 - 4.1.3 Pendapatan -LO
 - 4.1.4 Beban
 - 4.1.5 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 4.1.6 Aset
 - 4.1.7 Kewajiban
 - 4.1.8 Ekuitas Dana
- 4.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.

BAB V : PENUTUP

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan, Perangkat Daerah. Khususnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan atau menargetkan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp. 186.647.300.000,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 210.790.301.492,00 atau 112,94 % dan mendapatkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 49.693.554.323,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 46.254.877.443,00 atau 93,08 % .

Adapun perincian capaian kinerja/realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 5.02 KEUANGAN				
SKPD	:5-02.0-00.0-00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN , PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
UNIT ORGANISASI	:5-02.0-00.0-00.01.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN , PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
SUB UNIT ORGANISASI	:5-02.0-00.0-00.01.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN , PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
KODE REK	URATAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	186.647.300.000,00	210.790.301.492,00	112,94	238.135.831.492,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	186.647.300.000,00	210.790.301.492,00	112,94	238.135.831.492,00
4.1.01	Pajak Daerah	170.683.000.000,00	194.225.836.352,00	113,79	187.735.572.043,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.364.300.000,00	7.616.908.000,00	119,68	7.363.948.100,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	24.738.037.893,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.600.000.000,00	8.947.557.140,00	93,20	18.298.273.456,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-	-
5	BELANJA	49.693.554.323,00	46.254.877.443,00	93,08	23.330.842.972,00
5.1	BELANJA OPERASI	27.202.626.037,00	23.961.359.585,00	88,08	22.647.408.172,00
5.1.01	Belanja Pegawai	13.895.305.832,00	11.934.563.246,00	85,89	12.602.146.643,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.307.320.205,00	12.026.796.339,00	90,38	10.045.261.529,00
5.2	BELANJA MODAL	329.383.100,00	313.475.000,00	95,17	683.434.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	329.383.100,00	313.475.000,00	95,17	470.097.500,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	213.337.300,00
5.4	BELANJA TRANSFER	22.161.545.186,00	21.980.042.858,00	99,18	-
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	22.161.545.186,00	21.980.042.858,00	99,18	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	136.953.745.677,00	164.535.424.049,00	120,14	214.804.988.520,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	136.953.745.677,00	164.535.424.049,00	120,14	214.804.988.520,00

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di bidang Keuangan selama tahun 2023 secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun Sub Kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah masih terdapat kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain adalah :

- 1) Sumber daya manusia dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang menguasai teknologi informasi (TI) perlu ditingkatkan.
- 2) Masih diperlukan hubungan yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif sehingga penetapan Perubahan APBD mengalami ketepatan waktu sehingga tidak menyebabkan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun.
- 3) Kesadaran dan kejujuran wajib pajak/ retribusi perlu ditingkatkan lagi sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah dipandang bisa ditingkatkan.
- 4) Masa pandemi Covid- 19 yang dimulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 masih terasa adanya.

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan capaian kinerja lebih optimal dengan cara mengikut sertakan para pegawai dalam bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu mengupayakan adanya penambahan pegawai untuk petugas pemungut pajak.
- 2) Melaksanakan koordinasi yang lebih baik lagi dengan Badan Anggaran DPRD agar Penetapan Perubahan APBD tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.
- 3) Mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah, edukasi dan evaluasi/monitoring Pendapatan Asli Daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
- 4) Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia guna tercapainya tujuan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak. Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas.

3.1 Entitas akuntansi SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan satuan kerja perangkat daerah sehingga sebagai entitas akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.2 Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut :

3.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- 2) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan

2. Pendapatan-LO

Pendapatan Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau

- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pendapatan LRA maupun Pendapatan-LO diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3.3.3 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari :

1. **Aset lancar** adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- b. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan Piutang

- a. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat ;
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi.
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- b. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria ;
 - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas dan
 - Jumlah piutang dapat diukur.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. **Aset non lancar** adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari :

1. **Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
2. **Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasikan Aset Tetap :

1. **Tanah** adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. **Peralatan dan Mesin** adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. **Gedung dan Bangunan** adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. **Aset Tetap Lainnya** adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. **Konstruksi dalam Pengerjaan** adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

3.3.4 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

3.4.1 Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui ;

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah kabupaten dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan / atau penguasaannya berpindah

3.4.2 Pengukuran Persediaan

- 1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir / nilai wajar.
- 2) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga / nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

3.4.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Kualitas Piutang Lancar;
- b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c) Kualitas Piutang Diragukan;
- d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - (1) Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Bupati / Pejabat yang ditunjuk (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 3 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
- b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;
- c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 2-4 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a) 0 % (nol perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b) 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah

4.1.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak dikelompokkan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selama tahun 2023 mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 186.647.300.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 210.790.301.492,00 atau 112,94 %. Sehingga PAD pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 27.345.530.000,00 atau 11,48 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu Rp. 238.135.831.492,00.

Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 170.683.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 194.225.836.352,00 atau 113,79 %, mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.490.264.309,00 bila dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 187.735.572.043,00 atau terdapat kenaikan 3,46 %.
2. Retribusi Daerah dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Sewa Tanah dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 6.364.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.616.908.000,00 atau 119,68% , melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 999.648.100,00. Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp 7.363.948.100,00 maka realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,44 %
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD pada Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan sedangkan tahun anggaran 2022 terealisasi Rp. 24.738.037.893,00
4. Pendapatan Lain-lain PAD yang sah, diantaranya hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan jasa giro dan pendapatan

bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian dan denda atas sanksi administrasi dengan penerimaan pendapatan yang disetor ke kas umum daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 9.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.947.557.140,00 atau 93,20%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 18.298.273.456,00 realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 9.350.716.316,00 atau 51,10 % .

Adapun Daftar Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

DAFTAR RINCIAN REALISASI PENERIMAAN PAD BPKPAD					
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 DAN 2022					
No	Uraian	Anggaran	Jumlah Realisasi 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PENDAPATAN DAERAH	186.647.300.000	210.790.301.492	112,9	238.135.782.492
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	186.647.300.000	210.790.301.492	112,94	238.135.782.492
A	PAJAK DAERAH	170.683.000.000	194.225.836.352	87,88	187.735.572.043
1	4.1.01.06 Pajak Hotel	440.000.000	445.851.328	101,33	463.419.085
	4.1.01.06.01 Pajak Hotel	440.000.000	445.851.328	101,33	463.419.085
2	4.1.01.07 Pajak Restoran	4.796.000.000	5.772.327.344	120,36	4.054.208.337
	4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.796.000.000	2.054.348.470	42,83	956.995.531
	4.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-	3.717.978.874	-	3.097.212.806
3	4.1.01.08 Pajak Hiburan	325.000.000	276.571.100	85,10	219.220.075
	4.1.01.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	-	-	-	9.625.000
	4.1.01.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	325.000.000	261.122.250	80,35	194.725.750
	4.1.01.08.09 Pajak Panti Pijat,Refleksi, Mandi Uap/SPA dan Pusat Kebugaran (Gym)	-	15.448.850	-	14.869.325
4	4.1.01.09 Pajak Reklame	2.525.000.000	2.110.410.586	83,58	2.480.165.236
	4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.525.000.000	1.432.809.612	-	1.706.426.009
	4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain	-	669.937.974	-	767.041.227
	4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan	-	7.663.000	-	6.698.000
5	4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan	59.800.000.000	65.713.288.301	109,89	62.938.471.264
	4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	59.800.000.000	65.713.288.301	109,89	62.938.471.264
6	4.1.01.11 Pajak Parkir	1.700.000.000	2.022.133.015	118,95	1.847.325.700
	4.1.01.11.01 Pajak Parkir	1.700.000.000	2.022.133.015	118,95	1.847.325.700
7	4.1.01.12 Pajak Air Tanah	2.500.000.000	2.383.935.200	95,36	2.326.470.500
	4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah	2.500.000.000	2.383.935.200	95,36	2.326.470.500
8	4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet	12.000.000	16.700.000	139,17	14.625.100
	4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet	12.000.000	16.700.000	139,17	14.625.100
9	4.1.01.14 Pajak Mineral bukan Logam dan Lainnya	85.000.000	17.010.000	20,01	20.009.700
	4.1.01.14.37 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	85.000.000	17.010.000	20,01	20.009.700
10	4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	72.500.000.000	71.684.539.466	98,88	70.295.627.002
	4.1.01.15.01 PBBP2	72.500.000.000	71.684.539.466	99	70.295.627.002
11	4.1.01.16 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	26.000.000.000	43.783.070.012	168	43.076.030.044
	4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak Guna	26.000.000.000	-	-	-
	4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru	-	43.783.070.012	-	43.076.030.044
B	RETIRIBUSI DAERAH (4.1.2)	6.364.300.000	7.616.908.000	119,68	7.363.948.100
1	4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha	6.364.300.000	7.616.908.000	119,68	7.363.948.100
	4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.364.300.000	7.616.908.000	119,68	7.363.948.100
C	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-	24.738.037.893
1	4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	-	-	-	24.738.037.893
	4.1.03.02.01 - BUMD (Lembaga Keuangan)	-	-	-	22.482.588.032
	4.1.03.02.02 - BUMD (Aneka Usaha)	-	-	-	992.106.751
	4.1.03.02.03 - BUMD (Bidang Air Minum)	-	-	-	1.263.343.110
D	LAIN-LAIN PAD YANG SAH (4.1.4)	9.600.000.000	8.947.557.140	93,20	18.298.224.456
1	4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000	488.829.281	122,21	3.706.621.578
	4.1.04.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	-	-	2.479.946.250
	4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya	400.000.000	488.829.281	122,21	1.226.675.328
2	4.1.04.05 Jasa Giro	2.000.000.000	1.129.817.707	56,49	1.257.165.411
	4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000	1.044.125.776	52,21	1.195.502.989
	4.1.04.05.02 Jaga Giro pada Kas di Bendahara	-	85.691.931	-	61.662.422
3	4.1.04.07 Pendapatan Bunga	7.200.000.000	3.233.095.854	44,90	9.687.808.118
	4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.200.000.000	3.233.095.854	44,90	9.687.808.118
4	4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	3.009.520.672	-	1.761.223.132
	4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan	-	3.009.520.672	-	1.761.223.132
5	4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	8.511.041	-	18.563.332
	4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	8.511.041	-	18.563.332
6	4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	387.349.501	-	551.212.807
	4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	2.856.886	-	9.615.233
	4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	3.772.820	-	2.498.172
	4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	380.719.795	-	539.099.402
	Denda Bea Balik Nama Kendaraan	-	-	-	-
7	4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian	-	690.433.084	-	1.315.630.078
	4.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	690.199.567	-	1.315.630.078
	4.1.04.15.05 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja(JK)	-	58.380	-	-
	4.1.04.15.06 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	-	175.137	-	-
8	4.1.04.23 Lain-Lain PAD yang SAH lainnya	-	-	-	49.000
	4.1.04.23.01 Lain-lain PAD yang sah lainnya - LRA	-	-	-	49.000
	Jumlah :	186.647.300.000	210.790.301.492	112,94	238.135.782.492

4.1.2 Belanja

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	2023			2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
BELANJA DAERAH					
1	Belanja Operasi	27.202.626.037,00	23.961.359.585,00	88,08	22.647.408.172,00
2	Belanja Modal	329.383.100,00	313.475.000,00	95,17	683.434.800,00
3	Belanja Transfer	22.161.545.186,00	21.980.042.858,00	99,18	- ,00
	Jumlah	49.693.554.323,00	46.254.877.443,00	93,08	23.330.842.972,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang / jasa, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp. 27.202.626.037,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.961.359.585,00 atau 88,08%. Mengalami kenaikan sebesar Rp 1.313.951.413,00 atau 5,80% bila dibanding realisasi tahun 2022 dimana realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 22.647.408.172,00 Rincian Belanja operasi adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	2023			2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
BELANJA OPERASI					
1	Belanja Pegawai	13.895.305.832,00	11.934.563.246,00	85,89	12.602.146.643,00
2	Belanja Barang dan Jasa	13.307.320.205,00	12.026.796.339,00	90,38	10.045.261.529,00
	Jumlah	27.202.626.037,00	23.961.359.585,00	88,08	22.647.408.172,00

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang meliputi; Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp 13.895.305.832,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.934.563.246,00 atau 85,89 %. Mengalami penurunan sebesar Rp.667.583.397,00 atau 5,30 % bila dibanding realisasi tahun 2022 dimana realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 12.602.146.643,00

Rincian Belanja Pegawai seperti dalam tabel berikut ini;

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE	
5.1.01	Belanja Pegawai	13.895.305.832,00	11.934.563.246,00	85,89	12.602.146.643,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.253.845.000,00	3.155.091.858,00	96,97	3.078.029.694,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.335.766.530,00	2.302.897.629,00	98,59	2.239.930.028,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	258.893.322,00	241.326.160,00	93,21	242.293.671,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	199.545.750,00	195.370.000,00	97,91	198.205.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	82.368.943,00	77.360.000,00	93,92	68.405.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	152.799.751,00	144.550.320,00	94,60	141.725.940,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.658.007,00	9.733.988,00	49,52	8.966.261,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.120.661,00	32.882,00	2,93	35.598,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	180.565.338,00	164.876.760,00	91,31	160.075.329,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN	6.528.315,00	4.736.039,00	72,55	4.598.246,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Kematian ASN	16.598.383,00	14.208.080,00	85,60	13.794.621,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.009.154.000,00	1.977.761.200,00	98,44	1.913.354.324,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	805.107.688,00	791.104.480,00	98,26	765.341.730,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.204.046.312,00	1.186.656.720,00	98,56	1.148.012.594,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.049.763.375,00	5.613.086.122,00	79,62	5.681.987.125,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.848.036.375,00	4.569.170.559,00	78,13	5.357.832.125,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.127.327.000,00	974.315.563,00	86,43	234.855.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	74.400.000,00	69.600.000,00	93,55	82.100.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.582.543.457,00	1.188.624.066,00	75,11	1.928.775.500,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.190.107.457,00	853.757.808,00	71,74	1.850.490.500,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	392.436.000,00	334.866.258,00	85,33	78.285.000,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan belanja barang dan jasa untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang meliputi ; Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belana Perjalanan Dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Belanja barang dan jasa untuk tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 13.307.320.205,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 12.026.796.339,00 atau 90,38% Realisasi belanja barang / jasa apabila dibandingkan dengan

tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.981.534.810,00 atau sebesar 19,73 % bila dibandingkan dengan realisasi belanja barang / jasa tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 10.045.261.529,00

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut ini ;

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE	
5:1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.307.320.205,00	12.026.796.339,00	90,38	10.045.261.529,00
5.1.02.01	Belanja Barang	3.689.461.730,00	3.358.742.327,00	91,04	2.779.654.541,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Habis Pakai	3.689.461.730,00	3.358.742.327,00	91,04	2.779.654.541,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.147.947.475,00	4.474.404.367,00	86,92	4.924.598.875,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.915.007.500,00	3.400.279.958,00	86,85	4.827.473.435,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	74.127.475,00	59.711.618,00	80,55	66.340.440,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.700.000,00	14.510.000,00	98,71	5.600.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	192.617.000,00	190.231.800,00	98,76	2.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	68.000.000,00	64.000.000,00	94,12	23.185.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	883.495.500,00	745.670.991,00	84,40	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	886.510.000,00	849.909.158,00	95,87	433.220.297,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	176.510.000,00	141.717.030,00	80,29	115.791.177,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	399.500.000,00	398.975.528,00	99,87	317.429.120,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi	100.000.000,00	99.527.000,00		
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	210.500.000,00	209.689.600,00		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	1.072.985.000,00	841.925.487,00	78,47	935.537.816,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.072.985.000,00	841.925.487,00	78,47	935.537.816,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.510.416.000	2.501.815.000	99,66	972.250.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.003.750.000	1.003.125.000	99,94	972.250.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.506.666.000	1.498.690.000	99,47	0

b. Belanja Modal

Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Belanja Modal untuk tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 329.383.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 313.475.000,00 atau sebesar 95,17 %. Mengalami penurunan sebesar Rp 369.959.800,00 atau 54,13 % bila dibanding realisasi tahun

anggaran 2022 dimana realisasi Belanja Modal sebesar Rp 683.434.800,00

Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja modal tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022 tertera dalam tabel berikut ini :

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE	
5:2:00	BELANJA MODAL	329.383.100,00	313.475.000,00	95,17	683.434.800,00
5:2:02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	329.383.100,00	313.475.000,00	95,17	470.097.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	222.740.000,00	222.740.000,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	222.740.000,00	222.740.000,00		
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.423.100,00	15.905.000,00	96,85	26.531.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.718.800,00	4.600.000,00	97,48	8.047.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.704.300,00	11.305.000,00	96,59	15.984.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	175.491.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	175.491.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	90.220.000,00	74.830.000,00	82,94	268.075.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	46.500.000,00	37.300.000,00	80,22	268.075.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	43.720.000	37.530.000	85,84	
5:2:05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	213.337.300,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	213.337.300,00

Untuk pembelian/pengadaan belanja modal tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun anggaran 2023 tidak mengadakan / menganggarkan pengadaan Tanah .

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah menganggarkan pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 329.383.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 313.475.000,00 bila dibanding tahun anggaran 2022 mengalami Penurunan sebesar Rp. 156.622.500,00 atau 33,32% dari Rp 470.097.500,00. Adapun rincian dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 313.475.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Modal Alat Angkutan pada tahun anggaran 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dianggarkan sebesar Rp. 222.740.000,00 dan terealisasi 100 % yaitu

Rp. 222.740.000,00 digunakan untuk pengadaan Kendaraan bermotor roda dua sesuai tabel berikut ;

No.	Pengadaan	Jenis barang	Volume	Satuan	harga satuan	JUMLAH
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					313.475.000
1.	Belanja Modal Alat Angkutan					222.740.000
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	VIAR N1	2	unit	25.550.000	51.100.000
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Motor Listrik DX-11	2	unit	27.000.000	54.000.000
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Motor G1 A/T	2	unit	29.830.000	59.660.000
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Motor Gesits Raya G	2	unit	28.990.000	57.980.000

2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dianggarkan sebesar Rp 16.423.100,00 dapat direalisasikan Rp 15.905.000,00 digunakan untuk Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor dan mebel dengan rincian sebagai berikut ;

No.	Pengadaan	Jenis barang	Volume	Satuan	harga satuan	JUMLAH
2.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					15.905.000
	Belanja Modal Alat Kantor	Alat Penyimpanan Rak Besi	2	unit	2.300.000	4.600.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (mebel)	Kursi Kerja Pejabat	1	unit	2.050.000	2.050.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (mebel)	Kursi Hadap	7	unit	765.000	5.355.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (mebel)	KURSI KANTOR ZUMA	2	unit	1.950.000	3.900.000

3) Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp 90.220.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 74.830.000,00 digunakan untuk pengadaan personal computer dan Komputer Unit Lainnya dengan rincian pengadaan belanja sebagai berikut ;

No.	Pengadaan	Jenis barang	volume	Satuan	harga satuan	JUMLAH
3.	Belanja Modal Komputer					74.830.000
	Belanja Modal Komputer Unit					37.300.000
	Personal komputer	PC ALL IN ONE AXIOO	1	unit	18.500.000	18.500.000
		Monitor	2	unit	1.950.000	3.900.000
	Komputer Unit Lainnya	KOMPUTER	2	unit	7.450.000	14.900.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer					37.530.000
	Peralatan personal Komputer	Line Interactive UPS	2	unit	2.495.000	4.990.000
		ECOTANK L4260 PRINTER	1	unit	5.500.000	5.500.000
		ECOTANK L6270 PRINTER	1	unit	7.000.000	7.000.000
		LCD Proyektor ACER X1	1	unit	6.900.000	6.900.000
		Printer Canon LBP6030	2	unit	2.050.000	4.100.000
		Printer Brother T720DW	1	unit	4.540.000	4.540.000
		Webcam (Conference Cam Logitech BCC950	1	unit	4.500.000	4.500.000

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun anggaran 2023 tidak menganggarkan pengadaan Gedung dan Bangunan.

4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang meliputi Jalan, Jembatan, Irigasi/ jaringan, Instalasi dan penerangan jalan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tidak menganggarkan ada koreksi pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang akan dijelaskan pada catatan Aset/Neraca .

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Akun ini menggambarkan Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Belanja Aset Tetap Lainnya meliputi belanja buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan, ternak dan tanaman.

Pada tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tidak menganggarkan anggaran tersebut.

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Akun ini merupakan gambaran Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. terdiri dari Belanja aset tak berwujud , namun pada tahun anggaran 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tidak menganggarkan pengadaan Aset Lainnya .

c. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah meliputi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa, dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Belanja Transfer untuk tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 22.161.545.186,00 dan terealisasi sebesar Rp 21.980.042.858,00 atau sebesar 99,18 %. sedangkan untuk tahun anggaran 2022 penganggarannya pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja transfer tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut ini :

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE	
5.4.00	BELANJA TRANSFER	22.161.545.186,00	21.980.042.858,00	99,18	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.161.545.186,00	21.980.042.858,00	99,18	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	19.030.902.204,00	18.901.646.704,00	99,32	
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota	257.345.000,00	128.089.500,00	49,77	.
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	18.773.557.204,00	18.773.557.204,00	100,00	.
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	3.130.642.982,00	3.078.396.154,00	98,33	.
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	3.130.642.982,00	3.078.396.154,00	98,33	.

Sedangkan rincian belanja transfer untuk belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintah Desa yang direkap per Kecamatan se Kabupaten Demak dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 21.980.042.858,00 adalah sebagaimana tabel berikut :

PAGU BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	
		BHPD PAJAK	BHRD RETRIBUSI	BHPD PAJAK	BHRD RETRIBUSI
1	2	3	4	11	12
A	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Retibusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	19.030.902.204	3.130.642.982	18.901.646.704	3.078.396.154
1	KECAMATAN MRANGGEN	1.587.536.857	264.011.040	1.587.536.857	264.011.040
2	KECAMATAN KARANGAWEN	919.078.776	170.106.038	919.078.776	170.106.038
3	KECAMATAN GUNTUR	1.488.266.225	215.356.829	1.488.266.225	215.356.829
4	KECAMATAN SAYUNG	1.532.848.410	235.271.921	1.532.848.410	235.271.921
5	KECAMATAN KARANGTENGAH	1.194.051.294	181.348.294	1.194.051.294	181.348.294
6	KECAMATAN DEMAK	1.056.404.023	151.245.966	1.056.404.023	151.245.966
7	KECAMATAN WONOSALAM	1.770.719.544	220.915.805	1.770.719.544	220.915.805
8	KECAMATAN GAJAH	1.420.473.747	175.300.742	1.420.473.747	175.300.742
9	KECAMATAN DEMPET	1.325.455.277	172.349.763	1.325.455.277	172.349.763
10	KECAMATAN KARANGANYAR	1.474.408.658	192.765.433	1.474.408.658	192.765.433
11	KECAMATAN MIJEN	1.263.368.619	160.153.444	1.263.368.619	160.153.444
12	KECAMATAN KEBONANGUNG	1.067.905.479	139.452.979	1.067.905.479	139.452.979
13	KECAMATAN BONANG	1.297.869.987	245.258.461	1.297.869.987	245.258.461
14	KECAMATAN WEDUNG	1.375.170.308	229.726.240	1.375.170.308	229.726.240
B	Belanja bagi hasil pajak daerah ke	257.345.000		128.089.500	
C	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pasar Desa		377.380.027		325.133.199
	JUMLAH :	19.288.247.204	3.508.023.009	18.901.646.704	3.078.396.154
	Jumlah realisasi belanja transfer bagi hasil pajak & retribusi sebesar				21.980.042.858

4.1.3 Pendapatan Laporan Operasional

Pendapatan Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ deficit - LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif

a. Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2023 mengelola Pendapatan Asli Daerah - LO sebesar Rp. 219.585.985.147,51 yang terdiri dari :

1) Hasil Pajak Daerah pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 170.683.000.000,00 dan terealisasi sesuai laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 194.225.836.352,00 atau 113,80% sedangkan Pendapatan Pajak Laporan Operasional tahun 2023 adalah sebesar Rp. **200.422.552.886,98** terdiri dari atau merupakan LRA Pajak tahun 2023 yaitu Rp. 194.225.836.352,00 plus Piutang Pajak Tahun 2023 Rp. 41.446.749.542,00 minus Piutang Pajak tahun 2022 Rp. 40.057.188.808,00 plus Koreksi Piutang Pajak Rp. 4.671.231.254 Plus Pendapatan Pajak diterima dimuka tahun 2022 Rp 504.330.138,67. dan minus Pendapatan Pajak diterima dimuka tahun 2023 Rp 368.405.591,697.

Adapun daftar rincian Pendapatan Pajak Daerah Laporan Operasional (LO), Pendapatan LRA dan Piutang Pajak sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN PENDAPATAN 2023	REALISASI PENDAPATAN LRA 2023	PIUTANG TAHUN 2022	KOREKSI PIUTANG	PIUTANG TAHUN 2023	PENDAPATAN LO 2023	PENDAPATAN DDM 2023	PENDAPATAN DDM 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Pendapatan Asli Daerah	222.922.228.383,00	210.790.301.492,00	51.626.268.058,44	5.602.222.041,44	53.481.419.893,00	219.585.985.147,51	4.422.564.091,69	4.252.464.680,34
A	Hasil Pajak Daerah	170.683.000.000,00	194.225.836.352,00	40.057.188.808,00	4.671.231.254,00	41.446.749.542,00	200.422.552.886,98	368.405.591,69	504.330.138,67
1	Pajak Hotel	440.000.000,00	445.851.328,00	-	-	-	445.851.328	-	-
2	Pajak Restoran	4.796.000.000,00	5.772.327.344,00	7.274.600,00	-	7.274.600,00	5.772.327.344	-	-
3	Pajak Hiburan	325.000.000,00	276.571.100,00				276.571.100		
4	Pajak Reklame	2.525.000.000,00	2.110.410.586,00	104.478.050,00		154.755.238,00	2.296.612.321	368.405.591,69	504.330.138,67
5	Pajak Penerangan Jalan	59.800.000.000,00	65.713.288.301,00	5.303.638.330,00	-	5.849.203.287,00	66.258.853.258	-	-
6	Pajak Parkir	1.700.000.000,00	2.022.133.015,00	4.005.750,00	-	4.005.750,00	2.022.133.015	-	-
7	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	2.383.935.200,00	60.901.450,00	-	79.023.200,00	2.402.056.950	-	-
8	Pajak Sarang Burung Walet	12.000.000,00	16.700.000,00	-	-	-	16.700.000	-	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam	85.000.000,00	17.010.000,00	-	-	-	17.010.000	-	-
10	PBB Perdesaan Perkotaan	72.500.000.000,00	71.684.539.466,00	34.576.890.628,00	4.671.231.254,00	35.352.487.467,00	77.131.367.559	-	-
11	Pajak BPHTB	26.000.000.000,00	43.783.070.012,00	-	-	-	43.783.070.012	-	-

- 2) Hasil Retribusi Daerah pada tahun 2023 dianggarkan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 6.364.300.000,00 dan dapat dilaksanakan atau terealisasi sebesar Rp. 7.616.908.000,00 jumlah ini termasuk ;
- Untuk Tahun 2022 dan 2023 tidak ada Piutang Retribusi
 - Pendapatan Retribusi diterima dimuka tahun 2022 Rp. 3.748.134.541,67
 - Pendapatan Retribusi diterima dimuka tahun 2023 Rp 4.054.158.500,00 Sehingga Pendapatan Laporan Operasional dari Pendapatan Retribusi (LO) tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 7.310.884.041,67**
- untuk perhitungan dan perinciannya adalah sebagaimana pada lampiran daftar rincian Pendapatan Pajak/Retribusi (LO) dan Piutang nya .
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO pada tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2023 sebesar dianggarkan sebesar Rp. 9.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.947.557.140,00. Pada Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2023 terdapat Piutang pada Pendapatan Kerugian Uang (TGR) dan Piutang Pendapatan Denda Pajak, sehingga terdapat jumlah Laporan Operasional Lain-lain PAD yang Sah (LO) sebesar Rp. 11.852.548.218,86 dengan penjelasan sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN PENDAPATAN 2023	REALISASI PENDAPATAN LRA 2023	PIUTANG TAHUN 2023	KOREKSI PIUTANG	PIUTANG TAHUN 2022	PENDAPATAN LO 2023
2	3	4	5	6	7	8
Lain-lain PAD yang sah	9.600.000.000,00	8.947.557.140,00	12.033.109.924,86	930.990.787,44	11.569.079.250,44	11.852.548.218,86
Hasil Penjualan BMD yang tidak terjual	400.000.000,00	488.829.281,00				488.829.281,00
Penerimaan Jasa Giro	2.000.000.000,00	1.129.817.707,00				1.128.257.280,86
Pendapatan Bunga	7.200.000.000,00	3.233.095.854,00				3.233.095.854,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	3.009.520.672,00	457.702.000,00	-	152.552.000,00	2.582.413.499,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan	-	8.511.041,00	(1.560.426,14)			8.511.041,00
Pendapatan denda pajak	-	387.349.501,00	11.576.968.351,00	930.990.787,44	11.416.527.250,44	3.721.008.179,00
Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji	-	690.433.084,00				690.433.084,00
Lain-Lain PD Yang Sah Lainnya		- ,00				-

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Pada tahun anggaran 2023 tidak terdapat penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO, sedangkan tahun anggaran 2022 terdapat pendapatan lain-lain pendapatan yang sah-LO sebesar Rp. 140.000.000,00 ini merupakan Penerimaan Hibah dari PT Berkat Hati Bahagia berdasarkan Berita Acara Nomor 001/BHB/XII/2022 tanggal 20 Nopember 2022 senilai Rp.140.000.000,00 (Aset berupa bangunan Kios Depan Gedung Garuda /20 bangunan kios ukuran 200 m2) yang merupakan hasil dari Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

4.1.4 Beban

a. Beban Pegawai

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode tahun 2023 yang meliputi beban belanja gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya, dan beban gaji dan tunjangan KDH dan WKDH dengan tanpa memperhitungkan rapel gaji / tunjangan tahun sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 13.895.305.832,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.934.563.246,00

Terhadap belanja pegawai yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sehingga Beban Pegawai sebesar Rp. 11.934.563.246,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Beban Gaji dan Tunjangan ASN tidak ada kapitalisasi sebesar Rp. 3.078.029.694,00.
- 2) Beban Tambahan Penghasilan ASN Rp. 1.913.354.324,00
- 3) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN Rp. 5.681.987.125,00
- 4) Beban Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH sebesar Rp. 1.928.775.500,00

Apabila beban Pegawai - LO tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

KODE REKENIN	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
09.01.00	Beban Pegawai - LO	11.934.563.246,00	12.602.146.643,00
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.155.091.858,00	3.078.029.694,00
	Beban Gaji Pokok ASN	2.302.897.629,00	2.239.930.028,00
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	241.326.160,00	242.293.671,00
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	195.370.000,00	198.205.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	77.360.000,00	68.405.000,00
	Beban Tunjangan Beras ASN	144.550.320,00	141.725.940,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.733.988,00	8.966.261,00
	Beban Pembulatan Gaji ASN	32.882,00	35.598,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	164.876.760,00	160.075.329,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.736.039,00	4.598.246,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	14.208.080,00	13.794.621,00
8.1.1.2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.977.761.200,00	1.913.354.324,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	791.104.480,00	765.341.730,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.186.656.720,00	1.148.012.594,00
8.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.613.086.122,00	5.681.987.125,00
	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.569.170.559,00	5.357.832.125,00
	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	974.315.563,00	234.855.000,00
	Beban Honorarium	69.600.000,00	82.100.000,00
	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	7.200.000,00
	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.188.624.066,00	1.928.775.500,00
	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	853.757.808,00	1.850.490.500,00
	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	334.866.258,00	78.285.000,00

b. Beban Barang dan Jasa

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah mencatat Belanja barang dan Jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 12.026.796.339,00 sedangkan Laporan Operasional Beban barang dan jasa tahun anggaran 2023 sebesar **Rp 11.139.253.767,00**. Terdapat selisih kurang antara Beban Barang dan Jasa dengan Beban Barang dan Jasa - LO sebesar **Rp. 887.542.572,00**

Adapun untuk Laporan Operasional Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp 11.139.253.767,00 yaitu berasal dari:

- 1) Beban Barang sebesar Rp 2.910.371.364,00
 - Beban barang pakai habis sebesar Rp. 2.910.371.364,00
- 2) Beban Jasa sebesar Rp. 7.035.550.286,00 terdiri dari :
 - Beban Jasa Kantor Rp 3.403.202.627,00
 - Beban Iuran Jaminan/Asuransi Rp 58.917.668,00
 - Beban Sewa Peralatan dan Mesin Rp 14.510.000,00
 - Beban Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 57.202.200,00
 - Beban Jasa Konsultasi non konstruksi Rp. 190.231.800,00
 - Beban Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp 64.000.000,00
 - Beban Insentif Rp. 745.670.991,00
 - Beban uang/jasa untuk pihak ketiga/masyarakat Rp. 2.501.815.000,00
- 3) Beban Pemeliharaan Rp 351.406.630,00 terdiri dari :
 - Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 141.717.030,00
- 4) Beban Pemeliharaan Aset tidak berwujud Rp 209.689.600,00
- 5) Beban Perjalanan Dinas Rp 841.925.487,00 terdiri dari :
 - Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 106.525.000,00
 - Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp 735.400.487,00
- 6) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat (Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi) Rp 2.501.815.000,00

Berikut rincian dan perbandingan beban barang dan jasa - LO tahun anggaran 2023 dan tahun 2022 ;

KODE REKENING	U R A I A N				TAHUN 2023	TAHUN 2022	
09		Beban Barang dan Jasa				11.139.253.767,00	8.436.622.711,17
09.02.00		Beban Barang (Persediaan)				2.910.371.364,00	2.383.323.779,50
09.02.01		Beban Barang Pakai Habis				2.910.371.364,00	2.383.323.779,50
		Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				0,00	17.036.500,00
		Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				90.594.894,00	90.095.005,00
		Beban Bahan-Bahan Bibit Tanaman				5.398.000,00	4.371.000,00
		Beban Bahan-Bahan Lainnya				539.474.000,00	251.708.335,00
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				156.988.625,00	334.849.101,00
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				49.014.000,00	52.589.300,00
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				764.987.345,00	732.015.258,50
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos				33.150.000,00	35.998.500,00
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer				86.338.000,00	38.022.230,00
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik				40.690.000,00	11.964.000,00
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas				34.500.000,00	0,00
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/ Cendera Mata				118.333.400,00	150.961.750,00
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				65.844.000,00	114.220.850,00
		Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				517.465.100,00	0,00
		Beban Makanan dan Minuman Rapat				350.684.000,00	433.050.800,00
		Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				15.500.000,00	33.024.650,00
		Beban Pakaian Sipil Resmi / Batik Tradisional				41.410.000,00	15.984.000,00
		Beban Pakaian Olahraga				0,00	67.432.500,00
09.03.		Beban Jasa				7.035.550.286,00	4.983.774.818,67
09.03.01		Beban Jasa Kantor				3.403.202.627,00	4.829.412.762,00
		Beban Jasa Pengelolaan BMD				7.000.000,00	0,00
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				60.650.000,00	73.100.000,00
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				872.840.000,00	1.138.540.000,00
		Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website				14.400.000,00	0,00
		Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				221.900.000,00	249.300.000,00
		Honorarium Tenaga Penanganan Prasarana				12.968.000,00	
		Beban Jasa Tenaga Administrasi				567.000.000,00	2.085.613.500,00
		Beban Jasa Tenaga Ahli				4.000.000,00	123.979.710,00
		Beban Jasa Tenaga Kebersihan				230.712.000,00	93.101.900,00
		Beban Jasa Konversi aplikasi				14.500.000,00	0,00
		Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				0,00	248.537.900,00
		Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan				0,00	72.214.400,00
		Beban Jasa Penyelenggaraan Acara				418.031.110,00	0,00
		Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga				0,00	1.050.000,00
		Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promotretan				62.705.000,00	94.173.570,00
		Beban Tagihan Telepon				3.170.404,00	1.451.637,00
		Beban Tagihan Air				23.646.875,00	22.918.000,00
		Beban Tagihan Listrik				203.064.585,00	182.588.445,00
		Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				6.400.000,00	6.180.000,00
		Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV				24.635.753,00	22.719.500,00
		Beban Paket/Pengiriman				1.128.200,00	1.009.200,00
		Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				81.630.700,00	15.190.000,00
		Beban Lembur				572.820.000,00	397.745.000,00
09.03.02		Beban Iuran Jaminan/Asuransi				58.917.668,00	66.374.856,67
		Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				41.679.648,00	46.971.040,00
		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				2.500.794,00	2.818.172,00
		Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				3.126.276,00	3.522.828,00
		Beban Asuransi Barang Milik Daerah				11.610.950,00	13.062.816,67
09.03.03		Beban Sewa Peralatan dan Mesin				14.510.000,00	5.600.000,00
		Beban Sewa Mebel/Alat besar darat lainnya				12.000.000,00	2.400.000,00
		Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya				2.510.000,00	3.200.000,00
09.03.04		Beban Sewa Gedung dan Bangunan				57.202.200,00	57.202.200,00
09.03.05		Beban Sewa Aset Tetap Lainnya				0,00	2.000.000,00
		Beban Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah				0,00	0,00
		Beban Sewa Musik Lainnya				0,00	2.000.000,00
09.03.06		Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi				190.231.800,00	0,00
		Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan				190.231.800,00	0,00
09.03.07		Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				64.000.000,00	23.185.000,00
		Beban Insentif				745.670.991,00	0,00

09.04.00			Beban Pemeliharaan	351.406.630,00	133.986.297,00
			Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	141.717.030,00	115.791.177,00
			Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00
			Beban Pemeliharaan Alat Besar -Alat Pembantu electric Generating Set	8.475.000,00	7.300.000,00
			Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Dinas Bermotor	87.780.030,00	18.499.205,00
			Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	1.437.000,00	24.233.422,00
			Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Rproduksi	2.050.000,00	0,00
			Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Alat kantor Lainnya	9.250.000,00	0,00
			Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel	1.500.000,00	0,00
			Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.605.000,00	12.200.000,00
			Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	2.440.000,00
			Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.555.000,00	21.867.150,00
			Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.065.000,00	29.251.400,00
			Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	18.195.120,00
			Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00
			Beban Pemeliharaan bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	-	0,00
			Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	18.195.120,00
			Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	
			Beban Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	209.689.600,00	
09.05.00			Beban Perjalanan Dinas	841.925.487,00	935.537.816,00
			Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	841.925.487,00	935.537.816,00
			Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	106.525.000,00	162.675.000,00
			Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	735.400.487,00	772.862.816,00
09.06.00			Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.501.815.000,00	0,00
			Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.501.815.000,00	0,00
			Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00
			Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.501.815.000,00	0,00

Penjelasan terhadap Beban Barang dan Jasa yang mengalami perubahan atau pengurangan **Rp. 887.542.572,00** yaitu berasal dari beban :

1. Beban barang pakai habis atau beban persediaan semula adalah sebesar Rp. 3.358.742.327,00 menjadi Rp. 2.910.371.364,00 berkurang **Rp. 448.370.963,00** disebabkan ;

- 1) Adanya penambahan atas :
 - Persediaan awal Rp. 663.485.142,50
 - Koreksi Mutasi Persediaan Rp. 249.998.698,00
 - Jumlah Rp. 913.483.840,5
 - 2) Pengurangan terhadap:
 - Persediaan akhir sebesar Rp. 844.389.703,50
 - Koreksi mutasi Beban Barang untuk diserahkan Masyarakat ke Beban Hibah Rp. 517.465.100,00
 - Jumlah Pengurangan Rp. 1.361.854.803,50
- Jumlah berkurang sebesar **Rp. 448.370.963,00**

2. Beban Jasa semula sebesar Rp. 4.474.404.367,00,00 karena adanya penambahan beban sehingga menjadi **Rp. 7.035.550.286,00** bertambah **Rp. 2.561.145.919,00** terdiri dari :
- a. Beban Jasa kantor semula sebesar Rp. 3.400.279.958,00 karena adanya utang beban sehingga menjadi **Rp. 3.403.202.627,00** bertambah **Rp. 2.922.669,00** disebabkan ;
- Utang Beban Jasa Langganan Tahun Anggaran 2022 Rp. 21.270.507,00 (minus)
 - Utang Beban Jasa Langganan Tahun Anggaran 2023 Rp. 24.193.176,00 (plus)

Rincian Penjelasan Utang Beban Langganan sebagai berikut :

DAFTAR UTANG BEBAN LANGGANAN TAHUN 2022 & 2023					
BPKPAD KABUPATEN DEMAK					
No	Uraian	2023	2022	KETERANGAN	
				Beban, dibayarkan :	
1	Langg Air PAM	3.457.000,00	2.597.900,00	18-Jan-24	20-Jan-23
2	Langganan Telepon	116.164,00	121.164,00	18-Jan-24	20-Jan-23
3	Langganan Internet	1.847.600,00	1.842.600,00	18-Jan-24	20-Jan-23
4	Lang PLN / Listrik	18.772.412,00	16.708.843,00	18-Jan-24	20-Jan-23
	Jumlah Langganan	24.193.176,00	21.270.507,00		

- b. Beban Jasa Iuran Jaminan / Asuransi semula Rp. 59.711.618,00 karena adanya beban jasa dibayar dimuka sehingga menjadi Rp. 58.917.668,00 berkurang sebesar **Rp. 793.950,00** disebabkan ;
- Adanya Beban Jasa Asuransi dibayar dimuka Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 5.428.500,00 dan Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 6.222.450,00.

BEBAN ASURANSI DIBAYAR DIMUKA			
NO	U R A I A N	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Beban Asuransi Kendaraan bermotor	6.222.450,00	5.428.500,00
a	Asuransi Mobil Toyota Kijang Innova		
	Nopol : H 22 E dengan Nomor Polis : 1007022122060004 , Periode 16 Juni 2022 s/d 16 Juni 2023		3.058.000,00
b.	Nopol : H 22 E dengan Nomor Polis : 1007022123060002 , Periode 1 Juli 2023 s/d 1 Juli 2024	3.528.450,00	
c	Asuransi Mobil Toyota Rush H-1064-XE		
	Nopol : H 1064 XE dengan Nomor Polis : 1007022122060003 , Periode 16 Juni 2022 s/d 16 Juni 2023 Rp. 5.689.200,-		2.370.500,00
d	Asuransi Mobil Toyota Rush H-1064-XE		
	Nopol : H 1064 XE dengan Nomor Polis : 1007022123060001 , Periode 1 Juli 2023 s/d 1 Juli 2024 Rp. 5.388.000,-	2.694.000,00	

- c. Beban Sewa Rumah/Gedung/Bangunan tahun 2023 semula tidak ada, karena adanya perjanjian (MoU) dengan PT Kereta Api Indonesia No. KL.701/X/26/DO.4-2020 tanggal 21 Oktober 2020 dengan masa perjanjian 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2024 (5 tahun) sebesar Rp. 286.011.000,00 sehingga pembayaran sewa yang menjadi beban sewa tempat tanah pada tahun anggaran 2023 bertambah yang merupakan Beban Sewa Rumah/Gedung adalah **Rp. 57.202.200,00**
 - d. Beban Uang/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat bertambah sebesar **Rp. 2.501.815.000** karena dimutasi ke beban Hibah.
3. Beban Pemeliharaan bangunan gedung /kantor semula Rp. 849.909.158,00 karena adanya kapitalisasi ke belanja modal aset sebesar Rp. 498.502.528,00 maka beban pemeliharaan berkurang sehingga menjadi Rp. 351.406.630,00 dengan penjelasan beban pemeliharaan yang kurang karena dimutasi ke aset tetap adalah sebagai berikut :
- a. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Rp. 199.298.528,00
 - b. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
Rp. 199.677.000,00
 - c. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp. 99.527.000,00
4. Beban Subsidi Tahun anggaran 2023 adalah untuk keringanan pembayaran denda piutang PBB kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp. 930.990.787,44 sedangkan untuk tahun anggaran 2022 ada keringanan atau pembebasan denda piutang PBB yang menjadi beban subsidi sebesar Rp 1.806.463.621,30

5. Beban Hibah

Beban uang/jasa untuk diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga pada tahun anggaran 2023 tidak ada Beban Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga atau beban hibah, sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar

Rp 972.250.000, ditambah mutasi beban barang untuk diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp. 277.486.420,00 sehingga Beban Hibah menjadi Rp. **1.249.736.420,00** .

6. Beban Penyisihan Piutang

Pada tahun 2023 terdapat beban penyisihan piutang sebesar **Rp. (1.122.666.720,59)** dengan penjelasan/rincian sebagai berikut:

- 1) Beban Penyisihan Piutang Pajak Rp. (1.566.824.026,31)
- 2) Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD
Rp. 444.157.305,72

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Per 31 Desember 2023 beban penyusutan terhadap aset tetap sebesar **Rp 1.437.314.385,00** dan tidak terdapat beban amortisasi terhadap aset tidak berwujud, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Beban penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar
Rp. 1.323.857.477,00
- 2) Beban penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar
Rp. 168.501.524,00 dan
- 3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar
Rp. 62.646.615

4.1.5 Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Ekuitas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada Tahun 2022 sebesar **Rp. 48.754.827.304,87**
- b. Pada Tahun 2023 terdapat Pendapatan – LO sebesar Rp. 219.585.985.147,51 dan Beban Belanja – LO yang terdiri dari Beban Pegawai Rp. 11.934.563.246,00, Beban Barang dan Jasa Rp 11.139.253.767,00, Beban Subsidi sebesar Rp. 930.990.787,44 , Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp. (1.122.666.720,59), Beban Penyusutan Rp. 1.437.314.385,00 jadi jumlah surplus/defisit dari operasi sebesar Rp. 219.274.814.947,67 dan defisit penjualan aset non lancar serta kegiatan Non operasional lainnya – LO sebesar

- Rp. 21.516.666,00 sehingga terdapat Surplus / deficit - LO sebesar **Rp. 42.066.916.824,66**
- c. Adanya Koreksi Ekuitas sebesar **Rp. (6.640.617.741,61)** yang terdiri dari :
- Koreksi Nilai Persediaan/Mutasi karcis Rp. (193.745.402,00)
 - Koreksi penyesuaian piutang sebesar Rp. (6.267.782.339,61)
 - Koreksi ekuitas mutasi aset tetap antar OPD Rp. (179.090.000,00)
- d. Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. (33.315.853.706,00)
- e. Per 31 Desember 2023 terdapat Ekuitas Akhir sebesar **Rp. 50.865.272.681,92**

4.1.6 ASET / Neraca

Jumlah Aset pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 55.312.029.949,61 terdiri dari Aset lancar sebesar Rp. 30.754.328.126,71. Aset Tetap sebesar Rp. 24.102.929.762,70 serta Aset lainnya sebesar Rp. 454.772.060,20 sehingga jumlah Aset sebesar **Rp. 55.312.029.949,61** sedangkan tahun anggaran 2022 jumlah aset sebesar Rp. 53.028.562.492,21 pada tahun 2023 ada peningkatan jumlah aset sebesar Rp. 2.283.467.457,40 atau 4,31 % .

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Per. 31 Desember 2023 saldo kas di bendahara pengeluaran adalah nihil dimana sisa Uang Persediaan telah di setor ke kas daerah. Namun pada Saldo kas dibendahara penerimaan sebesar Rp 343,00, sedangkan saldo kas tahun anggaran 2022 juga nihil.

2) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selama tahun 2023 mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan penetapan Pajak/Retribusi Daerah maupun Tagihan lainnya pada tahun 2023 yang merupakan Pendapatan – LO Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 219.585.985.147,51 dan Pendapatan LRA 2023 sebesar Rp 210.790.301.492,00 serta Pendapatan diterima

di muka sebesar Rp 4.422.564.091,69 dan adanya koreksi piutang dan penambahan piutang denda pajak sehingga jumlah Piutang Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 53.481.419.893,00** dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Piutang Pajak Daerah tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 41.446.749.542,00**
- terdiri dari :
- ❖ Piutang Pajak Restoran Rp. 7.274.600,00
 - ❖ Piutang pajak Reklame Rp. 154.755.238,00
 - ❖ Piutang Pajak Penerangan Jalan Rp. 5.849.203.287,00
 - ❖ Pajak Parkir Rp. 4.005.750,00
 - ❖ Pajak Air Tanah Rp. 79.023.200,00 dan
 - ❖ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) adalah Rp. 35.352.487.467,00

Secara keseluruhan piutang pajak daerah sampai dengan tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini :

DAFTAR PIUTANG PAJAK TAHUN 2023					
Piutang Pajak Air Tanah					
No	Tahun	Piutang 2022	Koreksi piutang/ Penghapusan	Pembayaran 2023	Sisa Piutang 2023
1	2016	653.000,00		-	653.000,00
2	2017	1.385.000,00		-	1.385.000,00
3	2018	2.846.000,00		-	2.846.000,00
4	2019	11.966.350,00		591.000,00	11.375.350,00
5	2020	10.338.550,00		738.000,00	9.600.550,00
6	2021	4.970.900,00		3.149.400,00	1.821.500,00
7	2022	28.741.650,00		28.197.150,00	544.500,00
8	2023	-			50.797.300,00
JUMLAH		60.901.450,00	-	32.675.550,00	79.023.200,00
Pajak Reklame					
No	Tahun	Piutang 2022	Koreksi piutang	Pembayaran 2023	Sisa Piutang 2023
1	2016	112.500,00		-	112.500,00
2	2017	1.331.250,00		-	1.331.250,00
3	2018	70.980.000,00		-	70.980.000,00
4	2019	12.939.550,00		787.500,00	12.152.050,00
5	2020	4.592.875,00		-	4.592.875,00
6	2021	1.187.500,00		-	1.187.500,00
7	2022	13.334.375,00		11.901.875,00	1.432.500,00
8	2023				62.966.563,00
JUMLAH		104.478.050,00	-	12.689.375,00	154.755.238,00
Pajak Restoran / Rumah Makan					
No	Tahun	Piutang 2022	Koreksi piutang	Pembayaran 2023	Sisa Piutang 2023
1	2017	7.274.600,00		-	7.274.600,00
2	2018			-	
3	2019				
4	2020				
5	2021				
6	2022				-
JUMLAH		7.274.600,00	-	-	7.274.600,00

Pajak Penerangan Jalan Umum					
No	Tahun	Piutang 2022	Koreksi piutang	Pembayaran 2023	Sisa Piutang 2023
1	2022	5.303.638.330,00		5.303.638.330,00	-
2	2023				5.849.203.287,00
JUMLAH		5.303.638.330,00	-	5.303.638.330,00	5.849.203.287,00
Pajak Parkir					
No	Tahun	Piutang 2022	Koreksi piutang	Pembayaran 2023	Sisa Piutang 2023
1	2017	4.005.750,00		-	4.005.750,00
2	2018	-		-	-
3	2019				
4	2020				
5	2021				
6	2022				
JUMLAH		4.005.750,00	-	-	4.005.750,00
Piutang PBB-P2					
No	Tahun	Piutang 2022	Koreksi piutang/ Penghapusan	Pembayaran 2023	Sisa Piutang 2023
1	2015	2.770.771.779,00	2.625.136.236,00	145.635.543,00	-
2	2016	2.177.158.868,00	2.046.095.018,00	131.063.850,00	-
3	2017	2.622.825.003,00	-	171.634.822,00	2.451.190.181,00
4	2018	2.524.309.653,00	-	197.952.752,00	2.326.356.901,00
5	2019	3.997.714.841,00	-	338.539.660,00	3.659.175.181,00
6	2020	4.554.436.838,00	-	464.886.104,00	4.089.550.734,00
7	2021	6.026.017.043,00	-	689.587.448,00	5.336.429.595,00
8	2022	9.903.656.603,00	-	2.043.855.112,00	7.859.801.491,00
9	2023				9.629.983.384,00
JUMLAH		34.576.890.628,00	4.671.231.254,00	4.183.155.291,00	35.352.487.467,00
Jumlah Pajak		40.057.188.808,00	4.671.231.254,00	9.532.158.546,00	41.446.749.542,00

- b) Piutang Retribusi dari Sewa Tanah dan Bangunan pada tahun 2023 Nihil.
- c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2023 sebesar **Rp. 12.033.109.924,86** terdiri dari Penerimaan Piutang Kerugian Uang (TPTGR) Rp. 457.702.000,00 dan Penerimaan Denda Pajak tahun 2023 sebesar Rp. 11.576.968.351,00 dengan rincian keterangan berikut ini :

DAFTAR PIUTANG LAIN2 PAD TAHUN 2023					
Piutang TPTGR Tahun 2022					
No	Tahun	Piutang TPTGR 2022	Koreksi Piutang	Pembayaran 2023	Sisa Piutang 2023
1	2017				
2	2021				
3	2022	152.552.000,00			152.552.000,00
4	2023				305.150.000,00
JUMLAH		152.552.000,00		-	457.702.000,00
1. Piutang Denda Pajak Restoran 2023					
No	Tahun	Piutang Denda 2022	Koreksi piutang	Pembayaran 2023	Sisa Piutang 2023
1	2017	3.491.808,00			3.491.808,00
2	2018	-			-
3	2019	-			-
4	2020	-			-
5	2021				-
6	2022				-
JUMLAH		3.491.808,00	-	-	3.491.808,00
2. Piutang Denda Pajak Reklame 2023					
No	Tahun	Piutang Denda 2022	Koreksi piutang	Pembayaran 2023	Sisa Piutang 2023
1	2016	54.000,00		-	54.000,00
2	2017	639.000,00		-	639.000,00
3	2018	34.070.400,00		-	34.070.400,00
4	2019	6.210.984,00		378.000,00	5.832.984,00
5	2020	2.204.580,00		-	2.204.580,00
6	2021	380.000,00		-	570.000,00
7	2022	55.950,00			399.750,00
8	2023				3.030.166,00
JUMLAH		43.614.914,00	-	378.000,00	46.800.880,00

3. Piutang Denda Pajak Parkir 2023					
No	Tahun	Piutang Denda 2022	Koreksi piutang	Pembayaran 2023	Sisa Piutang 2023
1	2017	1.922.760,00			1.922.760,00
2	2018				-
3	2019				-
4	2020				-
5	2021				-
6	2022				-
JUMLAH		1.922.760,00	-	-	1.922.760,00
4. Piutang Denda Pajak Air Tanah 2023					
No	Tahun	Piutang Denda 2022	Koreksi piutang	Pembayaran 2023	Sisa Piutang 2023
1	2016	313.440,00		-	313.440,00
2	2017	664.800,00		-	664.800,00
3	2018	1.366.080,00		-	1.366.080,00
4	2019	5.743.848,00		283.680,00	5.460.168,00
5	2020	4.962.504,00		354.240,00	4.608.264,00
6	2021	1.636.211,00		1.024.456,00	874.320,00
7	2022	122.225,00		91.985,00	160.920,00
8	2023				1.336.888,00
JUMLAH		14.809.108,00	-	1.754.361,00	14.784.880,00
5. Piutang Denda Pajak PBB 2023					
No	Tahun	Piutang Denda 2022	Koreksi piutang	Pembayaran 2023	Sisa Piutang 2023
1	2015	1.329.970.453,92	67.041.356,92	2.842.920,00	-
2	2016	1.045.036.256,64	60.400.964,64	2.494.679,00	-
3	2017	1.258.956.001,44	74.655.030,44	7.719.249,00	1.176.581.722,00
4	2018	1.211.668.633,44	85.641.459,44	9.366.322,00	1.116.660.852,00
5	2019	1.918.903.123,68	153.425.651,68	9.061.259,00	1.756.416.213,00
6	2020	2.186.129.682,24	208.837.528,24	14.293.341,00	1.962.998.813,00
7	2021	1.807.805.112,90	190.966.906,90	15.909.327,00	2.561.506.600,00
8	2022	594.219.396,18	90.021.889,18	32.609.417,00	2.357.964.850,00
9	2023				577.838.973,00
JUMLAH		11.352.688.660,44	930.990.787,44	94.296.514,00	11.509.968.023,00
Jumlah Denda		11.416.527.250,44	930.990.787,44	96.428.875,00	11.576.968.351,00
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah					(1.560.426,14)
Total		11.569.079.250,44	930.990.787,44	96.428.875,00	12.033.109.924,86

3) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 23.633.346.036,65 yang terdiri dari :

a) Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak dapat dijelaskan per jenis pajak yaitu antara lain sebagai berikut :

- Piutang Pajak Air Tanah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp. 79.023.200,00 dengan jumlah penyisihan sebesar Rp. 16.591.136,50
- Piutang Reklame tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp. 154.755.238,00 dengan penyisihan piutang sebesar Rp. 81.848.045,32

- Piutang Restoran tahun 2017 sebesar Rp. 7.274.600,00 dengan penyisihan sebesar Rp. 7.274.600,00
- Piutang Penerangan Jalan Umum tahun 2023 sebesar Rp. 5.849.203.287,00, dan terdapat penyisihannya sebesar Rp. 29.246.016,44
- Piutang Parkir tahun 2017 sebesar Rp. 4.005.750,00 dengan penyisihan sebesar Rp. 4.005.750,00
- Piutang PBB P-2 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp. 35.352.487.467,00 dengan jumlah penyisihan sebesar Rp. 12.154.254.903,02.

Jumlah Penyisihan Pajak tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 12.293.220.451,27**. Untuk lebih jelasnya penyisihan pajak dapat dilihat pada daftar berikut ini :

DAFTAR PIUTANG PAJAK DAN PENYISIHANNYA TAHUN 2023						
Piutang Pajak Air Tanah						
No	Tahun	Sisa Piutang 2023	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NVR)	Keterangan
1	2016	653.000,00	100%	653.000,00	-	Macet
2	2017	1.385.000,00	100%	1.385.000,00	-	Macet
3	2018	2.846.000,00	100%	2.846.000,00	-	Macet
4	2019	11.375.350,00	50%	5.687.675,00	5.687.675,00	Diragukan
5	2020	9.600.550,00	50%	4.800.275,00	4.800.275,00	Diragukan
6	2021	1.821.500,00	50%	910.750,00	910.750,00	Diragukan
7	2022	544.500,00	10%	54.450,00	490.050,00	Kur Lancar
8	2023	50.797.300,00	0,50%	253.986,50	50.543.313,50	Lancar
JUMLAH		79.023.200,00	4,60	16.591.136,50	11.888.750,00	-
Pajak Reklame						
No	Tahun	Sisa Piutang 2023	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NVR)	Keterangan
1	2016	112.500,00	100%	112.500,00	-	Macet
2	2017	1.331.250,00	100%	1.331.250,00	-	Macet
3	2018	70.980.000,00	100%	70.980.000,00	-	Macet
4	2019	12.152.050,00	50%	6.076.025,00	6.076.025,00	Diragukan
5	2020	4.592.875,00	50%	2.296.437,50	2.296.437,50	Diragukan
6	2021	1.187.500,00	50%	593.750,00	593.750,00	Diragukan
7	2022	1.432.500,00	10%	143.250,00	1.289.250,00	Kur Lancar
8	2023	62.966.563,00	0,50%	314.832,82	62.651.730,19	Lancar
JUMLAH		154.755.238,00	4,60	81.848.045,32	10.255.462,50	-
Pajak Restoran / Rumah Makan						
No	Tahun	Sisa Piutang 2023	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NVR)	Keterangan
1	2017	7.274.600,00	100%	7.274.600,00	-	Macet
2	2018		100%			Macet
3	2019		50%			Diragukan
4	2020		50%			Diragukan
5	2021		50%			Diragukan
6	2022	-	10%			Kur Lancar
JUMLAH		7.274.600,00	3,60	7.274.600,00	-	-

Pajak Penerangan Jalan Umum						
No	Tahun	Sisa Piutang 2023	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NVR)	Keterangan
1	2022	-	10%	-		Diragukan
2	2023	5.849.203.287,00	0,50%	29.246.016,44		Lancar
JUMLAH		5.849.203.287,00		29.246.016,44	-	
Pajak Parkir						
No	Tahun	Sisa Piutang 2023	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NVR)	Keterangan
1	2017	4.005.750,00	100%	4.005.750,00	-	Macet
2	2018	-	100%	-		Macet
3	2019		50%			Diragukan
4	2020		50%			Diragukan
5	2021		50%			Diragukan
6	2022		10%			Kur Lancar
JUMLAH		4.005.750,00		4.005.750,00	-	-
Piutang PBB-P2						
No	Tahun	Sisa Piutang 2023	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NVR)	Keterangan
1	2015	-	100%	-	-	Macet
2	2016	-	100%	-	-	Macet
3	2017	2.451.190.181,00	100%	2.451.190.181,00	-	Macet
4	2018	2.326.356.901,00	100%	2.326.356.901,00	-	Macet
5	2019	3.659.175.181,00	50%	1.829.587.590,50	1.829.587.591	Diragukan
6	2020	4.089.550.734,00	50%	2.044.775.367,00	2.044.775.367	Diragukan
7	2021	5.336.429.595,00	50%	2.668.214.797,50	2.668.214.798	Diragukan
8	2022	7.859.801.491,00	10%	785.980.149,10	7.073.821.342	Kur Lancar
9	2023	9.629.983.384,00	0,50%	48.149.916,92	9.581.833.467	Lancar
JUMLAH		35.352.487.467,00		12.154.254.903,02	13.616.399.096,90	
Jumlah Pajak		41.446.749.542,00		12.293.220.451,27	13.638.543.309,40	

b) Penyisihan Piutang Retribusi

Piutang retribusi dari pendapatan sewa tanah/bangunan pada tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 dan penyisihan piutang tahun 2023 sebesar **Rp. 0,00** atau nihil .

DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI TAHUN 2022						
Piutang Retribusi (Sewa Tanah/Bangunan) 2022						
No	Tahun	Sisa Piutang 2022	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NVR)	Keterangan
3. PENYEWAWA PERORANGAN						
1	2017	-	100%	-	-	Macet
2	2018		100%			Macet
3	2019		50%			Diragukan
4	2021		25%			Kur Lancar
JUMLAH		-		-	-	

c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD

Piutang Lain-lain PAD tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 12.033.109.924,86 dengan penyisihan piutang sebesar Rp. 11.340.125.585,37 terdiri dari :

- ❖ Penerimaan Kerugian Daerah (TPTGR) Piutang tahun 2023 sebesar Rp. 457.702.000,00 dengan Penyisihan piutang sebesar Rp. 305.127.000,00

DAFTAR PIUTANG LAIN2 PAD DAN PENYISIHANNYA TAHUN 2023						
Piutang TPTGR Tahun 2022						
No	Tahun	Sisa Piutang 2023	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NVR)	Keterangan
1	2017		100%	-	-	Macet
2	2021		100%	-	-	Macet
3	2022	152.552.000,00	100%	152.552.000,00	-	Macet
4	2023	305.150.000,00	50%	152.575.000,00	152.575.000,00	Diragukan
JUMLAH		457.702.000,00		305.127.000,00	152.575.000,00	

- ❖ Penerimaan denda pajak pada tahun 2023 sebesar Rp. 11.576.968.351,00 dan Piutang Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Rp. (1.560.426,14) dengan penyisihan piutang denda pajak sebesar Rp. 11.340.125.585,37 dengan rincian sebagai mana daftar berikut ini :

DAFTAR PIUTANG LAIN2 PAD DAN PENYISIHANNYA TAHUN 2023						
1. Piutang Denda Pajak Restoran 2023						
No	Tahun	Sisa Piutang 2023	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NVR)	Keterangan
1	2017	3.491.808,00	100%	3.491.808,00	-	Macet
2	2018	-	100%	-	-	Macet
3	2019	-	50%	-	-	Diragukan
4	2020	-	50%	-	-	Diragukan
5	2021	-	25%	-	-	Kur Lancar
6	2022	-	0%	-	-	Lancar
JUMLAH		3.491.808,00		3.491.808,00	-	-
2. Piutang Denda Pajak Reklame 2023						
No	Tahun	Sisa Piutang 2023	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NVR)	Keterangan
1	2016	54.000,00	100%	54.000,00	-	Macet
2	2017	639.000,00	100%	639.000,00	-	Macet
3	2018	34.070.400,00	100%	34.070.400,00	-	Macet
4	2019	5.832.984,00	100%	5.832.984,00	-	Macet
5	2020	2.204.580,00	100%	2.204.580,00	-	Macet
6	2021	570.000,00	100%	570.000,00	-	Macet
7	2022	399.750,00	100%	399.750,00	-	Macet
8	2023	3.030.166,00	0,5%-0,50%	680.722,81	2.349.443,19	Lancar diragukan
JUMLAH		46.800.880,00		44.451.436,81	-	-
3. Piutang Denda Pajak Parkir 2023						
No	Tahun	Sisa Piutang 2023	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NVR)	Keterangan
1	2017	1.922.760,00	100%	1.922.760,00	-	Macet
2	2018	-	100%	-	-	Macet
3	2019	-	100%	-	-	Diragukan
4	2020	-	100%	-	-	Diragukan
5	2021	-	100%	-	-	Kur Lancar
6	2022	-	100%	-	-	Lancar
JUMLAH		1.922.760,00		1.922.760,00	-	-

4. Piutang Denda Pajak Air Tanah 2023						
No	Tahun	Sisa Piutang 2023	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NVR)	Keterangan
1	2016	313.440,00	100%	313.440,00	-	Macet
2	2017	664.800,00	100%	664.800,00	-	Macet
3	2018	1.366.080,00	100%	1.366.080,00	-	Macet
4	2019	5.460.168,00	100%	5.460.168,00	-	Macet
5	2020	4.608.264,00	100%	4.608.264,00	-	Macet
6	2021	874.320,00	100%	874.320,00	-	Macet
7	2022	160.920,00	100%	160.920,00	-	Macet
8	2023	1.336.888,00	0,5%-0,50%	69.875,40	1.267.012,60	Lancar diragukan
JUMLAH		14.784.880,00		13.517.867,40	-	-
5. Piutang Denda Pajak PBB 2023						
No	Tahun	Sisa Piutang 2023	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NVR)	Keterangan
1	2015	-	100%	-	-	Macet
2	2016	-	100%	-	-	Macet
3	2017	1.176.581.722,00	100%	1.176.581.722,00	-	Macet
4	2018	1.116.660.852,00	100%	1.116.660.852,00	-	Macet
5	2019	1.756.416.213,00	100%	1.756.416.213,00	-	Macet
6	2020	1.962.998.813,00	100%	1.962.998.813,00	-	Macet
7	2021	2.561.506.600,00	100%	2.561.506.600,00	-	Macet
8	2022	2.357.964.850,00	100%	2.357.964.850,00	-	Macet
9	2023	577.838.973,00	0,5%-10%	39.485.663,16	538.353.309,84	Lancar diragukan
JUMLAH		11.509.968.023,00		10.971.614.713,16	-	
Jumlah Denda		11.576.968.351,00		11.034.998.585,37	-	
Piutang t		(1.560.426,14)				
Total		12.033.109.924,86		11.340.125.585,37	152.575.000,00	

- 4) **Beban dibayar dimuka**
- akun ini menjelaskan suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Per. 31 Desember 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdapat Beban dibayar dimuka sebesar **Rp. 63.424.650,00** yang terdiri dari :
- Beban Jasa Asuransi dibayar dimuka Tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 6.222.450,00** dan Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 5.428.500,00
 - Beban Sewa Rumah/Gedung/Tanah dibayar dimuka pada tahun anggaran 2023 masih ada sebesar Rp. **57.202.200,00** karena adanya perjanjian dengan PT Kereta Api Indonesia No.KL.701/X/26/DO.4-2020 tanggal 21 Oktober 2020 dengan masa perjanjian 01 januari 2020 s/d 31 Desember 2024 (5 tahun) sebesar Rp. 286.011.000,00 dan beban sewa tempat tanah setiap tahunnya adalah sebesar Rp. **57.202.200,00**

dengan penjelasan perhitungan beban dibayar dimuka sebagai berikut ;

BEBAN ASURANSI DIBAYAR DIMUKA			
NO	U R A I A N	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Beban Asuransi Kendaraan bermotor	6.222.450,00	5.428.500,00
a	Asuransi Mobil Toyota Kijang Innova		
	Nopol : H 22 E dengan Nomor Polis : 1007022122060004 , Periode 16 Juni 2022 s/d 16 Juni 2023		3.058.000,00
b.	Nopol : H 22 E dengan Nomor Polis : 1007022123060002 , Periode 1 Juli 2023 s/d 1 Juli 2024	3.528.450,00	
c	Asuransi Mobil Toyota Rush H-1064-XE		
	Nopol : H 1064 XE dengan Nomor Polis : 1007022122060003 , Periode 16 Juni 2022 s/d 16 Juni 2023 Rp. 5.689.200,-		2.370.500,00
d	Asuransi Mobil Toyota Rush H-1064-XE		
	Nopol : H 1064 XE dengan Nomor Polis : 1007022123060001 , Periode 1 Juli 2023 s/d 1 Juli 2024 Rp. 5.388.000,-	2.694.000,00	
BEBAN SEWA TANAH DIBAYAR DIMUKA			
NO	U R A I A N	2023	2022
1	Beban sewa Rumah/Ge	57.202.200,00	114.404.400,00
	Sewa Aset tanah milik PJK (Tanah lokasi Kec. Demak, Sanggar Pramuka dll) sebesar Rp. 286.011.000,- selama 5 tahun (1 Januari	-	-
	Sewa pertahun sebesar	57.202.200,00	114.404.400,00
	Jumlah Beban dibayar c	63.424.650,00	119.832.900,00

1) Persediaan

Persediaan Per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 844.389.703,50 jika dibandingkan dengan persediaan Per. 31 Desember 2022 sebesar Rp. 663.485.142,50 ada kenaikan sebesar Rp 180.904.561,00 atau 27,26 % .

Persediaan Per. 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada rekap persediaan berikut ini :

Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2023				
No	Jenis Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022	Ket
A	Belanja Barang Habis Pakai	844.389.703,50	663.485.142,50	
1	Bahan Lainnya	6.402.000,00	4.835.000,00	
	- Alat RT dan Kebersihan	1.822.000,00	255.000,00	
	- Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.580.000,00	4.580.000,00	
2	Alat Tulis Kantor	110.402.200,00	118.862.625,00	
3	Kertas dan Coveer	10.187.600,00	7.792.200,00	
4	Bahan Cetak	314.019.975,50	315.594.817,50	
	- Cetak Karcis	163.887.155,50	160.779.057,50	
	- Cetak Lainnya	150.132.820,00	154.815.760,00	
5	Benda Pos	-	2.280.000,00	
6	Bahan Komputer	14.435.000,00	-	
7	Alat Listrik Dan Elektronik	564.000,00	436.000,00	
8	Souvenir/Cedera Mata	-	88.733.400,00	
9	Kegiatan Kantor Lainnya	40.501.000,00	24.326.000,00	
10	Barang diserahkan ke Masyarakat	347.877.928,00	100.625.100,00	
	Jumlah :	844.389.703,50	663.485.142,50	

Pengurus Barang Pengguna pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah melakukan opname fisik atas persediaan barang / bahan tahun 2023 dengan rincian sebagai mana terlampir.

b. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 24.102.929.762,70 dan Rp. 24.763.853.979,70.

Adapun aset tetap terdiri dari aset-aset sebagaimana pada tabel dan dengan penjelasan berikut:

NO	URAIAN	Per 31/12/20223	Per 31/12/2022
1	Tanah	9.637.546.000,00	9.637.546.000,00
2	Peralatan dan Mesin	12.408.321.763,31	12.517.426.751,62
3	Gedung dan Bangunan	10.340.166.328,00	9.867.469.800,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.206.258.555,70	3.106.731.555,70
5	Aset Tetap Lainnya	19.106.100,00	19.106.100,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.508.468.984,31))	(10.384.426.227,62)
	JUMLAH :	24.102.929.762,70	24.763.853.979,70

1) Tanah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Per 31 Desember 2023 mencatat aset tanah sama dengan tahun 2022 sebesar Rp. 9.637.546.000,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan , sesuai Buku Inventaris pada tabel berikut.

Tabel Daftar Aset Tanah

Saldo per 31/12/2022	9.637.546.000,00
Penambahan tahun 2023	0,00
Pengurangan tahun 2023	0,00
Saldo per 31/12/2023	9.637.546.000,00

2) Peralatan dan Mesin

Per. 31 Desember 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 12.408.321.763,31 meningkat / bertambah sebesar Rp. 109.104.988,31 atau 1,35 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 12.517.426.751,62 , dengan keterangan sbb. :

Saldo per 31/12/2022	12.517.426.751,62
Penambahan tahun 2023	313.760.000,00
Pengurangan tahun 2023	422.864.988,31
Saldo per 31/12/2023	12.408.321.763,31

Penjelasan : adanya penambahan/pengurangan aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 109.104.988,31 karena adanya Penambahan/Belanja Pengadaan aset dan Pengurangan/Mutasi Keluar sebagai berikut :

- a) Pengadaan belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 313.760.000,00 dengan keterangan sebagaimana daftar belanja modal berikut :

❖ Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp. 222.740.000,00 untuk pengadaan kendaraan bermotor beroda dua dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pengadaan	Jenis barang	Volume	Satuan	harga satuan	JUMLAH
1.	Belanja Modal Alat Angkutan					222.740.000
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	VIAR N1	2	unit	25.550.000	51.100.000
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Motor Listrik DX-11	2	unit	27.000.000	54.000.000
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Motor G1 A/T	2	unit	29.830.000	59.660.000
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Motor Gesits Raya G	2	unit	28.990.000	57.980.000

- ❖ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp 15.905.000,00 untuk Pengadaan Alat Penyimpanan Rak Besi, dan Kursi kerja pejabat dan meubel dengan rincian barang sebagai berikut ;

2.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					15.905.000
	Belanja Modal Alat Kantor	Alat Penyimpanan Rak Besi	2	unit	2.300.000	4.600.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (mebel)	Kursi Kerja Pejabat	1	unit	2.050.000	2.050.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (mebel)	Kursi Hadap	7	unit	765.000	5.355.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (mebel)	KURSI KANTOR ZUMA	2	unit	1.950.000	3.900.000

- ❖ Belanja Modal Komputer sebesar Rp 74.830.000,00 untuk pengadaan Personal computer dan Komputer Unit Lainnya dengan rincian pengadaan belanja sebagai berikut ;

No.	Pengadaan	Jenis barang	volume	Satuan	harga satuan	JUMLAH
3.	Belanja Modal Komputer					74.830.000
	Belanja Modal Komputer Unit					37.300.000
	Personal komputer	PC ALL IN ONE AXIOO	1	unit	18.500.000	18.500.000
		Monitor	2	unit	1.950.000	3.900.000
	Komputer Unit Lainnya	KOMPUTER	2	unit	7.450.000	14.900.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer					37.530.000
	Peralatan personal Komputer	Line Interactive UPS	2	unit	2.495.000	4.990.000
		ECOTANK L4260 PRINTER	1	unit	5.500.000	5.500.000
		ECOTANK L6270 PRINTER	1	unit	7.000.000	7.000.000
		LCD Proyektor ACER X1	1	unit	6.900.000	6.900.000
		Printer Canon LBP6030	2	unit	2.050.000	4.100.000
		Printer Brother T720DW	1	unit	4.540.000	4.540.000
		Webcam (Conference Cam Logitech BCC950	1	unit	4.500.000	4.500.000

- ❖ Adanya ekstra komptabel (Alat Rumah Tangga Lainnya di jual) Rp. 285.000,00

b) Pengurangan aset Mutasi Keluar sebesar Rp. 422.864.988,31 terdiri dari :

- ❖ Mutasi keluar atas barang milik daerah ke OPD 6 Kecamatan dan Kelurahan Singorejo sebagai hadiah percepatan pelunasan pajak (PBB) sebesar Rp. 179.090.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Daftar Mutasi Keluar Antar SKPD				
ALAT ANGKUTAN				
No.		Jumlah	Harga Satuan	Keterangan
1.	Motor Listrik DX-11	1	Rp27.000.000	Kecamatan Wonosalam
		1	Rp27.000.000	Kecamatan Guntur
3.	Motor G1 A/T	1	Rp29.830.000	Kecamatan sayung
		1	Rp29.830.000	Kecamatan Kebonagung
4.	Motor Gesits Raya G	1	Rp28.990.000	Kecamatan Demak
		1	Rp28.990.000	Kecamatan Gajah
			Rp171.640.000	
KOMPUTER				
No.		Jumlah	Harga Satuan	Keterangan
1.	KOMPUTER	1	Rp7.450.000	Kelurahan Singorejo
	Jumlah mutasi keluar		Rp179.090.000	

- ❖ Mutasi Pengurangan/ keluar atas barang milik daerah karena penghapusan barang sebesar Rp. 243.774.988,31,- untuk ;
 - 1) Penghapusan barang dari daftar inventaris barang milik daerah berupa alat angkutan 1 unit sepeda motor Rp. 14.400.000,- berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 030/330 Tahun 2023 tanggal20 Oktober 2023.
 - 2) Penghapusan barang alat kantor dan rumah tangga dan alat studio, komunikasi dan pemancar sejumlah Rp. 229.374.988,31 berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 030/456 Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023.

Nilai aset peralatan dan mesin pada KIB per 31 Desember 2023 antara Neraca dan KIB terdapat selisih sebesar Rp. 3.109.000,00 karena terdapat Aset dalam KIB yang termasuk dalam aset ekstra komptabel sebesar Rp. 3.109.000,00

3) Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah membukukan Aset gedung dan bangunan ada penambahan dari Belanja Pemeliharaan yang membentuk Aset /mutasi tambah karena kapitalisasi sebesar Rp. 472.696.528,00 sehingga Aset Gedung dan Bangunan tahun 2023 yaitu sebesar Rp.10.340.166.328,00 bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penambahan. Sedangkan Aset gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp. 9.867.469.800,00 dengan keterangan sebagai berikut :

Saldo per 31/12/2022	9.867.469.800,00
Penambahan tahun 2023	472.696.528,00
Pengurangan tahun 2023	0,00
Saldo per 31/12/2023	10.340.166.328 ,00

Penjelasan :

Adanya penambahan aset Rp. 472.696.528,00 adalah sebagai berikut :

- a) Mutasi tambah Bangunan gedung tempat parkir senilai Rp. 199.677.000,00
- b) Mutasi tambah Rehab gedung kantor Rp. 199.298.528,00 d
- c) Mutasi tambah berupa bangunan Kanopi samping kantor Rp. 73.721.000,00

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah mencatat Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 3.206.258.555,70 mengalami penambahan sebesar Rp. 99.527.000,00 bila dibanding dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp 3.106.731.555,70 dengan keterangan sebagai berikut:

Saldo per 31/12/2022	3.106.731.555,70
Penambahan tahun 2023	99.527.000,00
Pengurangan tahun 2023	0,00
Saldo per 31/12/2023	3.206.258.555,70

Penjelasan : adanya Penambahan sebesar Rp. 99.527.000,00 karena adanya koreksi ekuitas aset tetap sebagai berikut :

■ Penambahan Aset tetap berupa Pemeliharaan Jembatan
Penyeberangan Orang (JPO) sebesar Rp. 99.527.000,00

5) Aset Tetap Lainnya

Per. 31 Desember 2023, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah membukukan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 19.106.100.00 masih sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 19.106.100.00 .

Saldo per 31/12/2022	19.106.100,00
Penambahan tahun 2023	0,00
Pengurangan tahun 2023	0,00
Saldo per 31/12/2023	19.106.100,00

6) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan terhadap Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Per. 31 Desember 2023 sebesar Rp. 11.508.468.984,31 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 10.384.426.227,62 dengan uraian rincian penjelasan sebagai berikut :

Daftar Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022			
NO.	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN 2022
	Belanja Modal / Aset	11.508.468.984,31	10.384.426.227,62
	Peralatan dan Mesin	9.727.664.272,31	8.853.907.588,62
1	Alat - alat besar	204.100.000,00	203.504.763,00
2	Alat- alat Angkutan	2.635.803.210,00	2.332.162.898,00
3	Alat Bantu	-	-
4	Alat Bengkel Bermesin	3.638.332,00	2.458.332,00
5	Alat Ukur dan Pengolahan	2.034.999,00	1.374.999,00
6	Alat Pertanian	1.850.000,00	1.250.000,00
7	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.990.979.307,00	1.910.448.978,31
	- Alat Kantor	1.209.359.436,00	1.150.167.934,00
	- Alat Rumah Tangga	714.394.671,00	701.117.211,31
	- Meja dan Kursi Kerja	67.225.200	59.163.833
8	Alat Studio dan Komunikasi	300.295.465,00	249.416.265,00
	- Alat Studio	279.120.465	219.391.265
	- Alat Komunikasi/Pemancar	21.175.000	30.025.000
9	Komputer	4.588.962.959	4.153.291.353
	- Komputer Unit	1.485.418.054	1.346.021.580
	- Peralatan Komputer	3.103.544.905	2.807.269.773
	Gedung dan Bangunan	1.315.015.753,00	1.129.793.226,00
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.289.369.960	1.112.416.117
2	Monumen	10.191.667	5.707.667
3	Tugu Tanda Batas	15.454.126	11.669.442
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	465.788.959,00	400.725.413,00
1	Jalan dan Jembatan	254.551.755,00	202.410.591,00
2	Bangunan air	16.160.433,00	15.209.819,00
3	Jaringan :	195.076.771,00	183.105.003,00
	- Jaringan Air Minum	-	-
	- Jaringan Listrik	191.826.938,00	180.269.258,00
	- Jaringan Telepon	3.249.833,00	2.835.745,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-

Jumlah Aset Tetap sebesar Rp. 24.102.929.762,70

c. Aset Lainnya

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/ dikuasai dan/ atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2023 Jumlah Aset lainnya sebesar Rp. 454.772.060,20 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp. 524.553.700,20 yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah dihapuskan

Penjelasan :

Aset lainnya sebesar Rp. 454.772.060,20 adalah merupakan ;

- 1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rp. 245.442.505,20
- 2) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 482.207.900,00 terdiri dari;
 - Aset Tidak Berwujud lainnya Rp. 74.136.900,00
 - Adanya koreksi ekuitas (software) Rp. 408.071.000,00
- 3) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp.(272.878.345,00) terdiri dari ;
 - Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software Rp. (122.031.512,00)
 - Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya Rp. (150.846.833,00)

Jumlah Aset tahun 2023 sebesar Rp. 55.312.029.949,61

4.1.7 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Per. 31 Desember 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah membukukan kewajiban sebagai berikut :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Per 31 Desember 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah membukukan kewajiban jangka pendek sebesar **Rp. 4.446.575.267,69** sedangkan tahun 2022 sebesar **Rp. 4.273.735.184,34** dengan keterangan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	PER 31/12/2023	PER 31/12/2022
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
2	Utang bunga	-	-
3	Pendapatan diterima dimuka	4.422.564.091,69	4.252.464.680,34
4	Utang beban	24.193.176,00	21.270.507,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH	4.446.757.267,69	4.273.735.187,34

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Utang PFK, Utang Perhitungan Pihak Ketiga nihil
2. Utang bunga, Utang bunga pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah nihil.
3. Pendapatan diterima dimuka

Per. 31 Desember 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mencatat Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp. 4.422.564.091,69 yaitu terdiri dari :

 - Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp. 368.405.591,69 terdiri dari Pajak :
 - ✓ Reklame Papan Rp. 363.325.888,82
 - ✓ Reklame Kain Rp. 1.164.454,24
 - ✓ Reklame Berjalan Rp. 3.915.248,63
 - Pendapatan Retribusi sebesar Rp. 4.054.158.500,00 terdiri dari ;
 - ❖ Sewa Tanah/Bangunan Perorangan/Pihak ketiga Rp. 314.315.000,00 dan
 - ❖ Sewa Tanah Bengkok Kelurahan Rp, 3.739.843.500,00

Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut dibawah ini :

PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DITERIMA DIMUKA			
No	Uraian	2023	2022
1	Pajak Reklame	368.405.591,69	504.330.138,67
	- Reklame papan	363.325.888,82	498.907.388,57
	- Reklame kain	1.164.454,24	3.415.955,58
	- Reklame berjalan	3.915.248,63	2.006.794,52
2	Pajak Bumi dan Bangunan P2	-	-
3	Retribusi Sewa Tanah/Bangunan	4.054.158.500,00	3.748.134.541,67
	- Sewa Tanah/Bangunan perorangan	314.315.000,00	532.284.541,67
	- Sewa Tanah Bengkok Kelurahan	3.739.843.500,00	3.215.850.000,00
	Jumlah :	4.422.564.091,69	4.252.464.680,34

4. Utang beban/Belanja.

Utang beban pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 24.193.176,00 terdiri dari :

- Utang beban Air PDAM sebesar Rp. 3.457.000,00
- Utang beban Telpon Rp. 116.164,00
- Utang beban Internet Rp. 1.847.600,00
- Utang beban Listrik Rp. 18.772.412,00

DAFTAR UTANG BEBAN LANGGANAN TAHUN 2022 & 2023					
BPKPAD KABUPATEN DEMAK					
No	Uraian	2023	2022	KETERANGAN	
				Beban, dibayarkan :	
1	Langg Air PAM	3.457.000,00	2.597.900,00	18-Jan-24	20-Jan-23
2	Langganan Telepon	116.164,00	121.164,00	18-Jan-24	20-Jan-23
3	Langganan Internet	1.847.600,00	1.842.600,00	18-Jan-24	20-Jan-23
4	Lang PLN / Listrik	18.772.412,00	16.708.843,00	18-Jan-24	20-Jan-23
	Jumlah Langganan	24.193.176,00	21.270.507,00		

5. Utang Jangka Pendek Lainnya :

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran.Per 31 Desember 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

4.1.8 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Per 31 Desember 2023.

Jumlah kewajiban sebesar Rp. 4.446.757.267,69

Jumlah ekuitas sebesar Rp. 50.865.272.681,92

Jumlah Kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp. **55.312.029.949,61**

BAB V PENUTUP

Demikian ada beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan keuangan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan ini diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak ini masih perlu untuk disempurnakan, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

